



Konsekuensi dari Kebijakan Perubahan Iklim yang Buruk: Peringatan dari Tetangga Indonesia

Oleh

Luke Gallen

Intern di The Habibie Center
thc@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Iklim sedang berubah, ilmu pengetahuannya telah ditetapkan¹, kebijakan tidak. Dampak perubahan iklim di Indonesia telah tersebar luas dan makin nyata dari tahun ke tahun. Menanggapi hal ini, Indonesia telah diminta oleh para pemangku kepentingan internasional untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan iklim yang lebih konkret.² Bagian pertama artikel ini bertujuan untuk menyoroti kekurangan pemerintah dalam kebijakan iklim yang kurang baik, meskipun ada retorika dan ambisi yang positif. Setelahnya, terdapat diskusi lebih lanjut mengenai masa depan perdagangan global yang akan menekan ekonomi yang gagal untuk memasukkan kebijakan perubahan iklim yang proaktif.

Jadi, apa masalahnya?

Jakarta sedang mengalami dampak dari perubahan iklim. Ibukota Indonesia tersebut memberikan contoh utama dari efek tersebut yang mengarah pada memburuknya polusi udara dan banjir hebat. Polusi udara adalah masalah nyata yang dihadapi oleh Jakarta, salah satu kota yang biasa menduduki daftar “kota paling berpolusi di dunia”.³ Hal tersebut didukung oleh data dari air monitoring stations yang terletak di Kedutaan US pada 2017, yang menunjukkan kualitas udara Jakarta hanya dianggap ‘baik’ selama 26 hari di tahun itu.⁴ Polusi udara yang buruk selama beberapa tahun ini mengakibatkan berkurangnya usia harapan hidup warga sebanyak 2.3 tahun.



Bencana lain yang dihadapi Jakarta, yang juga diperburuk oleh perubahan iklim, adalah banjir. Secara reguler, ibukota menghadapi peningkatan level air setiap tahunnya. Malam tahun baru 2019 ditandai dengan tingkat curah hujan tertinggi sejak 2017, seperti yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).⁵ Kepada VICE Indonesia, juru bicara dari badan tersebut menyatakan bahwa banjir itu jelas terkait dengan pemanasan global. Meskipun banjir bukanlah hal baru bagi Jakarta, perubahan iklim telah memperkuat curah hujan yang ekstrim dan juga menyebabkan banjir yang lebih intensif.⁶ Namun, ini hanyalah dua dari berbagai ancaman perubahan iklim terhadap Indonesia secara nasional.⁷

Masalah-masalah ini diperparah oleh kurangnya pendidikan dan kesadaran yang serius oleh warga negara Indonesia. YouGov-Cambridge Globalism Project menemukan bahwa 18% orang Indonesia yang disurvei tidak percaya bahwa perubahan iklim adalah hasil dari campur tangan manusia.⁸ Penyebab dari hal tersebut mungkin berasal dari media Indonesia yang memfokuskan pada isu-isu agama dan politik, alih-alih memberikan paparan mendalam tentang isu-isu iklim. Kecenderungan ini bias jadi merupakan hasil dari sistem pendidikan yang kurang mementingkan isu-isu seperti perubahan iklim. Namun demikian, semakin intensifnya bencana alam dan memburuknya polusi udara seharusnya semakin mendorong adanya diskusi tentang pentingnya kebijakan iklim yang lebih baik.

Kebijakan Jakarta Saat Ini

Pada awal masa jabatan pertamanya, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan retorika yang optimis untuk membatasi efek perubahan iklim.⁹ Pernyataan ini merupakan reaksi terhadap berkurangnya kualitas udara akibat kebakaran oleh gambut pada tahun 2015. Sejak momen itu, kebijakan lingkungan yang diajukan oleh pemerintah terus-menerus gagal memanfaatkan krisis iklim. Melihat kedua bencana alam yang dihadapi Jakarta, sebagaimana dijelaskan di atas, kritik keras berlayangan kepada pemerintah yang dirasa tidak cukup bertindak untuk mengurangi dampak berbahaya dari iklim pemanasan.

The Lowy Institute melaporkan satu contoh kritikan, di mana koalisi warga mengajukan gugatan menyusul keprihatinan mereka terhadap pemerintah dalam penanganan kualitas udara di Jakarta.¹⁰ Koalisi tersebut menuntut undang-undang yang secara efektif mengatur polusi udara dalam krisis iklim ini dan menyediakan data yang lebih transparan tentang tingkat polusi udara. Tuntutan warga yang serupa telah berhasil dalam kasus-kasus lain, yang baru-baru ini terjadi di Paris, di mana negara Prancis dinyatakan bersalah karena tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mengurangi polusi udara.¹¹





Secara umum, Indonesia belum mengambil langkah-langkah penting untuk menciptakan kebijakan iklim yang baik. Pengumpul data independen, Climate Action Tracker (CAT) menilai proyeksi kebijakan Indonesia saat ini sebagai 'tidak mencukupi', sementara target Paris Agreement 2030 Indonesia pun masih dicap sebagai 'sangat tidak mencukupi'.¹² Salah satu bidang yang harus diinvestasikan untuk mempromosikan kebijakan iklim yang lebih baik adalah sumber bahan bakar terbarukan. CAT menggambarkan satu cara seperti itu, di mana Indonesia dapat memenuhi Paris Agreement dan mencapai pembangunan berkelanjutan jika Indonesia, "[mengubah] investasi dalam batu bara yang direncanakan untuk lima tahun ke depan menuju solusi terbarukan, nol-karbon". Ada tekanan pada pemerintahan Jokowi untuk memindahkan investasi ke industri terbarukan yang membatasi polusi gas rumah kaca. Ini akan membatasi dampak pada perubahan iklim dan meminimalkan lebih intensif dari bencana alam terkait dengan iklim yang lebih hangat.

Konsekuensi dari Kebijakan Iklim yang Buruk: Negara yang Terbakar Matahari

Jika melihat ke Australia, Anda akan menemukan negara yang mengalami hasil dari buruknya kebijakan iklim. Gambaran dari kebakaran hutan saat ini telah terpampang di media global selama musim panas.¹³ Kebakaran hutan yang membakar tanah sebanding dengan daratan Korea Selatan, telah menyebabkan hancurnya ribuan rumah, lenyapnya miliaran hewan, dan meningkatnya jumlah korban jiwa yang mencakup penduduk dan petugas pemadam kebakaran.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa kebakaran hutan ini adalah salah satu contoh yang dihasilkan dari kebijakan lingkungan Australia secara keseluruhan di bawah kepemimpinan saat ini. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison memimpin partai Liberal yang konservatif, yang secara praktis tidak fokus pada kebijakan lingkungan yang proaktif.¹⁵ Meskipun Morrison bukanlah seorang penyangkal perubahan iklim, ia selalu menolak kuat akan adanya kebijakan iklim yang lebih baik. Morrison percaya bahwa Australia telah "bertanggung jawab", dan percaya bahwa pemanasan iklim pada dasarnya adalah kebiasaan baru yang harus kita adopsi.¹⁶ Ia juga seorang pendukung batu bara, di mana ia dikenal oleh rakyat Australia yang sadar lingkungan sebagai orang yang membawa segumpal fisik batu bara ke parlemen sebagai sebuah aksi pemasaran yang aneh.¹⁷

Tidak banyak upaya yang dilakukan pemerintah Australia untuk menciptakan langkah-langkah proaktif dalam melawan dampak perubahan iklim. Karena itu, Indeks Kinerja Perubahan Iklim 2020 memberi kebijakan iklim Australia di peringkat terendah (0.0) yang menyatakan bahwa pemerintah Australia saat ini terus "memperburuk kinerja mereka di tingkat nasional dan internasional."¹⁸ Selain itu, Pemerintah Australia telah dilarang untuk berbicara di UN Climate Change Summit karena dukungan terus-



menerusnya terhadap “industri yang merusak lingkungan.”¹⁹

Australia memiliki ekonomi yang unik, karena Australia merupakan salah satu dari sedikit negara maju yang sangat bergantung pada mineral dan sumber daya alam untuk mempertahankan angka Produk Domestik Bruto-nya. Ini adalah salah satu alasan paling relevan mengapa Australia tidak berinvestasi dan mengandalkan sumber bahan bakar atau industri yang lebih ramah lingkungan. Ketergantungan pada batu bara ini sangat terasa, meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa kegagalan untuk menegakkan kebijakan iklim yang baik akan menyebabkan kejatuhan ekonomi.²⁰ Pemerintah Australia saat ini terus bersikeras untuk tidak menerapkan kebijakan transformatif atau proaktif untuk menghadapi perubahan iklim.²¹ Sikap ini nampak jelas ketika Australia adalah satu-satunya negara yang pada akhir 2019 secara terbuka berencana menggunakan kredit karbon Kyoto mereka dari negosiasi 1997, untuk memenuhi target Paris Agreement.²²

Studi kasus ini sangat penting bagi Indonesia karena, seperti Australia, ekonomi Indonesia juga sangat bergantung pada produk pertambangan, sebagaimana pemerintahan Jokowi membuka 10 pabrik batubara tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia.²³ Kita patut mempertanyakan apakah keputusan untuk terus berinvestasi begitu tinggi terhadap mineral merupakan keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Beberapa orang yang antagonis terhadap pemanasan global berpendapat bahwa konsesi terhadap kebijakan iklim diperlukan untuk memastikan pertumbuhan positif di berbagai sektor ekonomi lainnya. Namun, studi kasus di Australia menunjukkan bahwa angka tingkat pengangguran, neraca perdagangan, utang rumah tangga dan nilai dollar Australia tahun lalu relatif buruk.²⁴ Walaupun ada banyak faktor untuk dipertimbangkan selain dari kesalahan kebijakan iklim yang buruk, sejumlah indikator ekonomi yang berkinerja buruk di Australia – meskipun ada pertumbuhan ekonomi global – masih menarik untuk dipelajari lebih lanjut.

Analisis

Ada beberapa poin penting untuk Indonesia. Pertama, para pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa ke depannya orang Indonesia harus lebih memahami ‘krisis iklim’ yang ada. Tindakan ini termasuk perlunya dukungan dari lembaga pemerintah, penyedia pendidikan, dan media, karena mereka memiliki sumber daya untuk menyuarakan dan mendiskusikan realitas dari perubahan iklim dengan lebih akurat. Kedua, kebijakan lingkungan di Indonesia saat ini perlu diperbaiki dan diselaraskan dengan retorika positif yang digaungkan oleh para pemimpin dalam pencegahan perubahan iklim. Ketiga, Australia adalah negara tetangga yang maju, yang harus bertindak sebagai contoh konsekuensi dari kebijakan perubahan iklim





yang buruk. Perlu diketahui bahwa konsesi terhadap kebijakan iklim yang baik tidak akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Masa depan ekonomi global bergerak menjauh dari investasi kepada bahan bakar yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan diversifikasi ekspor untuk memenuhi permintaan biofuel terbarukan yang terus meningkat. Jika Indonesia terus berinvestasi tinggi dalam minyak kelapa sawit yang tidak terbarukan, berarti Indonesia telah gegabah 'menempatkan banyak telurnya di dalam satu keranjang'

Endnotes

- 1 Environmental Defense Fund (2019) "7 undeniable climate change facts." Retrieved from: <https://www.edf.org/climate/how-climate-change-plunders-planet/climate-facts>; See also, BBC News (2020, January 16) "What is Climate Change? A Really Simple Guide." Retrieved from: <https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772>.
- 2 Agnes Anya, The Jakarta Post (2019, June 21) "Indonesia must address climate change in more concrete terms: UN." Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/21/indonesia-must-address-climate-change-in-more-concrete-terms-un.html>.
- 3 SausanAtika, The Jakarta Post (2019, August 8) "Airvisual: Jakarta declared world's most polluted city on Thursday afternoon." Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/08/airvisual-jakarta-declared-worlds-most-polluted-city-on-thursday-afternoon.html>.
- 4 Kate Walton, The Lowy Institute (2019, July 1) "Jakarta's air quality kills its residents – and it's getting worse." Retrieved from: <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/jakarta-s-air-quality-kills-its-residents-and-it-s-getting-worse>.
- 5 VICE (2019, January 6) "Jakarta's Floods Are Yet Another Wake-Up Call on Climate Change." Retrieved from: https://www.vice.com/en_in/article/4agdqb/jakarta-flood-new-year-climate-change.
- 6 Markus Donat et al (2016) "More extreme precipitation in the world's dry and wet regions" 6 Nature Climate Change 508.
- 7 Muhammad Zikra et al (2015) "Climate Change Impacts on Indonesia Coastal Areas." 14 Procedia Earth and Planetary Science 57.
- 8 Adi Renaldi, VICE (2019, May 15) "Indonesia Is Home to the Most Climate Change Deniers in the World." Retrieved from: https://www.vice.com/en_in/article/a3x3m8/indonesia-climate-change-deniers-yougov-poll.
- 9 Philip Jacobson, Mongabay (2016, June 12) "How is Indonesian president Jokowi doing on environmental issues?" Retrieved from: <https://news.mongabay.com/2016/06/how-is-indonesian-president-jokowi-doing-on-environmental-issues/>.
- 10 The Lowy Institute, above n iv.
- 11 BBC News (2019, June 25) "Paris air pollution: French state blamed in landmark case." Retrieved from: <https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-48762911>.
- 12 Climate Action Tracker (2019, December 2) Retrieved from: <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/current-policy-projections/>.
- 13 Amy Gunia and Andrew Katz, TIME (2020, January 7) "Australia Is Burning: Scenes From a Deadly Season of Bushfires." <https://time.com/longform/australia-bushfires-photos/>; See also: <https://www.theguardian.com/australia-news/gallery/2019/sep/17/this-is-what-climate-change-looks-like-in-australia-in-pictures>.
- 14 Reuters (2020, January 9) "Sizing up Australia's bushfires." Retrieved from: <https://www.reuters.com/article/us-australia-bushfires-scale/sizing-up-australias-bushfires-idUSKBN1Z81GF>.
- 15 Scott Wilson, The Washington Post (2020, January 19) "In Australia, fires energize environmental movement." Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/national/in-australia-fires-heat-up-the-environmental-movement/2020/01/18/99c912e6-38de-11ea-80e9-06738e0c2b7b_story.html.





- 16 Sarah Martin, The Guardian (2020, January 20) "Australia already 'carrying its load' on emissions and must adapt to warmer climate, PM says." Retrieved from: <https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/29/australia-already-carrying-its-load-on-emissions-and-must-adapt-to-warmer-climate-pm-says>.
- 17 Sonali Paul, Reuters (2019, May 19) "In coal we trust: Australian voters back PM Morrison's faith in fossil fuel." Retrieved from: <https://www.reuters.com/article/us-australia-election-energy/in-coal-we-trust-australias-voters-back-pm-morrison-faith-in-fossil-fuel-idUSKCN1SP06F>.
- 18 Climate Change Performance Index (2020) "Results 2020." Retrieved from: https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/12/CCPI-2020-Results_Web_Version.pdf.
- 19 Bethan Smoleniec, SBS (2019, September 19) "Australia banned from speaking at UN climate change summit in 'unprecedented' rebuke." Retrieved from: <https://www.sbs.com.au/news/australia-banned-from-speaking-at-un-climate-change-summit-in-unprecedented-rebuke>.
- 20 Neil Irwin, The New York Times (2019, January 17) "Climate Change's Giant Impact on the Economy: 4 Key Issues." Retrieved from: <https://www.nytimes.com/2019/01/17/upshot/how-to-think-about-the-costs-of-climate-change.html>; See also: Australian Prime Minister Scott Morrison's affinity with coal is widely known <https://www.gizmodo.com.au/2019/11/scott-morrison-coal-climate-change/>.
- 21 Marc Hudson, The Conversation (2019, April 19) "In Australia, climate policy battles are endlessly reheated." Retrieved from: <https://theconversation.com/in-australia-climate-policy-battles-are-endlessly-reheated-114971>.
- 22 James Fernyhough and Elouise Fowler, The Australian Financial Review (2019, December 19) "The countries with the biggest hoard of Kyoto credits." Retrieved from: <https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/the-countries-with-the-biggest-hoard-of-kyoto-credits-20191216-p53kay>.
- 23 Asialink Business (2019) "Indonesia's Exports." Retrieved from: <https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/indonesias-exports>.
- 24 Alan Austin, Independent Australia (2019, January 27) "Global recovery skips Australia as economy suffers Coalition's incompetence." Retrieved from: <https://independentaustralia.net/politics/politics-display/-global-recovery-skips-australia-as-economy-suffers-coalitions-incompetence-,13531>.





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id